

PROPAGANDA ORDE BARU 1966-1980

Dwi Wahyono Hadi
Gayung Kasuma

ABSTRAK

Penelitian ini adalah tulisan yang membahas mengenai Propaganda Pemerintah Orde Baru Tahun 1966-1980. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rezim Orde Baru saat itu berhasil memperoleh legitimasi kekuasaan melalui berbagai cara, diantaranya ialah menggunakan jalan propaganda pembangunan. Secara garis besar pada akhirnya rezim Orde Baru mampu memaksakan rakyat untuk patuh dan tunduk terhadap segala kebijakan yang diarahkan pemerintah, baik dengan cara-cara persuasif maupun represif.

Kata kunci: Propaganda, Politik, Orde Baru.

ABSTRACT

This research discusses about New Order Government Propaganda's during 1966 to 1980. The results of this study indicate that the New Order was successfully obtained the legitimacy of power through various means, such as development propaganda. Basically at the end of the New Order regime was able to force people to comply with and be subject to all policies directed at the government, either by means of persuasive and repressive.

Keyword: Propaganda, Politics, New Order.

Kondisi Perpolitikan Nasional Orde Baru 1966-1980

Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mampu berkuasa selama 32 tahun di Republik Indonesia. Melalui proses yang cukup panjang, pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional pasca peristiwa 1965. Seperti halnya yang ditegaskan oleh Ali Moertopo, bahwa stabilitas politik dan keamanan nasional merupakan syarat utama bagi kelangsungan pembangunan (Ali Moertopo, 1983:26-28).

Pada periode atau kurun waktu 1966-1980 bisa dikatakan sebagai tahapan dari era konsolidasi Orde Baru dan Soeharto. Sebagai upaya untuk menggantikan posisi Soekarno, kemunculan dari Jendral Soeharto yang

bahkan sebelumnya tidak dikenal, menjadi aktor yang cukup berperan dalam perubahan tatanan politik pasca peristiwa 65. Namun pada awalnya perubahan yang dilakukan oleh Jendral Soeharto tidaklah cukup radikal.

Langkah awal yang dilakukan oleh Soeharto untuk berada ditampuk kepemimpinan Orde Baru adalah melalui Sidang Umum MPR 1967. Pada Sidang Istimewa itu, Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno. Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah pada Sidang Istimewa MPR 1967, oleh Presiden Soeharto dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971.

- 1) Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Angkatan 2006
- 2) Dosen Pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga.

Maret 1968 MPRS secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia (Yasuo Hanazaki, 1998:55). Pemerintahan Orde Baru yang dikendalikan oleh Soeharto memberi peran sosial politik yang cukup besar bagi ABRI terutama Angkatan Darat. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyusun kekuatan bangsa dan negara untuk mencapai stabilitas nasional dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Ali Moertopo, Dwi Fungsi ABRI yang terjadi pada masa Orde Baru, merupakan *balance* yang dinamis dalam *partnership* sipil ABRI. Artinya hubungan antara sipil dan ABRI harus dilaksanakan dengan penuh tanggung Jawab agar menciptakan dan menjaga keseimbangan dan ketepatan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan (Ali Moertopo, 1981:256).

Di bawah komando ABRI, pemerintah Orde Baru berhasil menunjukkan pada dunia mengenai keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia, sehingga meyakinkan negara donor untuk berinvestasi. Keberhasilan pemerintah Orde Baru ini telah memperkokoh keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung. Namun kemajuan dibidang ekonomi tersebut harus dibayar mahal dengan semakin ketatnya pengaturan mengenai hak-hak politik sipil. Disamping itu pesatnya pertumbuhan ekonomi telah melahirkan sisi negatif berupa ketimpangan sosial, ketidakadilan, ketiadaan jaminan keamanan sosial maupun budaya, dan berbagai ekses lainnya seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peran Golkar sebagai kendaraan politik Orde Baru juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurut Harold Crouch dalam buku "*The Army and Politics in Indonesia*", hasil pemilu tahun

1971 menunjukkan besarnya dukungan rakyat terhadap Golkar, hal tersebut berdampak drastis pada menurunnya minat dan keinginan dari organisasi-organisasi sipil yang cukup terorganisir untuk berdiri sebagai oposisi terhadap rezim yang berkuasa (Harold Crouch, 1998:347).

Tak cukup dengan menggandeng ABRI dan menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik utama dalam membangun kehidupan politik nasional. Presiden Soeharto juga mengambil langkah untuk merubah tata tertib (*tatib*), yang menempatkan DPR dan MPR sebagai institusi politik yang sepenuhnya berada dibawah pengawasannya. Hak-hak yang dimiliki Soeharto sebagai kepala negara diantaranya adalah menunjuk seperlima anggota DPR dan tiga per lima anggota MPR. Tata tertib yang mengenai pembagian kursi DPR dan MPR tersebut sangat membatasi peran politik dari PDI dan PPP, serta hanya menguntungkan Golkar yang tentu saja menjamin berlanjutnya dominasi pemerintahan Orde Baru yang mengabaikan pandangan mayoritas public (Mochtar Pabotinggi, 1995:247).

Sebagai upaya dari konsolidasi dan penyeragaman ide, akhirnya pada tahun 1969 melalui Keputusan Nomor 107 tahun 1969 Pengurus Pusat Sekber Golkar³⁾ memberikan mandat kepada ketua umum untuk melakukan restrukturisasi Sekber Golkar (Priyo Budi Santoso, 1997: 97). Hasil restrukturisasi pada Oktober tahun 1969, adalah Sekber Golkar melakukan reorganisasi dengan membuat tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO), diantaranya SOKSI, KOSGORO, MKGR, Profesi, Ormas Hankam, dan Karya Pembangunan. Organisasi-organisasi tersebut adalah organisasi baru yang menampung kaum intelektual dan politisi Orde Baru yang

3) Sekber Golkar pada mulanya adalah organisasi yang sifatnya sangat heterogen, dimana banyak dari anggotanya merupakan politisi dan intelektual independen, disamping itu kepemimpinan Sekber Golkar didominasi oleh para perwira militer yang sebagian besar dekat dengan Soekarno.

modernis dan berpikiran reformis (Priyo Budi Santoso, 1997:98).

Melalui Karya Pembangunan, kemudian Ali Moertopo membuka ruang bagi kaum intelektual dan politisi non partai seperti Moerdopo, Lim Bian Kie, Lim Bian Koen, Cosmas Batubara, David Napitupulu, dan lain-lain untuk bertugas memimpin dan mengawal fraksi Karya Pembangunan di DPR ke arah yang mendukung program pembangunan Orde Baru.

Penguatan hegemoni Golkar tak berhenti sampai pada langkah restrukturisasi dan reorganisasi Sekber Golkar saja. Pada tanggal 11 Februari 1970 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri No.12/1969 dan PP No.6 Tahun 1970, tentang larangan pegawai negeri menjadi anggota parpol, serta hanya boleh memberikan dukungannya kepada Golkar. Jika ingin terlibat dalam Golkar atau parpol, pegawai negeri harus mendapat izin khusus dari pemimpinnya. Golkar sendiri pun kemudian banyak membangun organisasi *ondrebouw* melalui jaringan korporasi untuk menggalang massa, seperti KORPRI untuk pegawai negeri (Julian M. Boileau, 1983:71).

Pemerintahan ideal dalam kacamata Orde Baru adalah pemerintahan yang kuat dan berusaha tampil dominan dalam usaha-usaha pembangunan nasional (Harry Tjan Silalahi, 1990:12). Namun pada kenyataannya dominasi pemerintah dirasakan terlalu kuat, dalam hal ini misalnya seperti “monoloyalitas” yang berusaha dikembangkan terhadap pegawai negeri dan aparat birokrasi untuk senantiasa mendukung kebijakan yang diambil pemerintah.

Propaganda Orde Baru 1966-1980

Sejak berkuasa pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berusaha menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Usaha-usaha tersebut didasarkan pada tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Menurut Soeharto, berdirinya Orde Baru tidak ada alasan lain kecuali untuk membangun kembali struktur kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Semuanya harus kembali berlandaskan penerapan semurni-murninya Pancasila dan UUD 1945 (Soeharto, 1985:7). Hal tersebut berkaitan erat dengan komunisme yang dianggap sebagai akar permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara pada tahun-tahun pertama Orde Baru. Penerapan Pancasila sebagai ideologi tunggal bangsa, tak pelak menjadi salah satu cara membangun citra pemerintahan yang anti dan bersih dari komunisme.

Salah satu aspek yang kemudian menjadi sorotan pembenahan Orde Baru adalah mulai membangun politik luar negeri yang bebas dan aktif. Karena pada masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), politik luar negeri Indonesia lebih cenderung berkiblat pada negara-negara komunis. Hal ini terlihat dari dibentuknya poros dengan negara-negara komunis seperti dengan Peking, Pnom Phen, Hanoi dan Pyongyang. Oleh sebab itulah Orde Baru pada masa awal kekuasaannya berusaha merubah citra tersebut dengan melakukan pembenahan politik luar negeri dan kembali menjadi anggota PBB (Heri Kusmanto, 2007:10).⁴⁾ Pemerintahan Orde Baru cenderung menerapkan kebijakan luar negeri Indonesia yang berubah 180 derajat dari

4) Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia tak hanya kembali menjadi anggota PBB. Indonesia juga bekerjasama dengan banyak negara, seperti dalam pasukan perdamaian PBB, dan kerjasama dengan negara-negara Islam (OKI).

pendahulunya yaitu pendekatan yang lebih bersifat *low profile*.⁵⁾

Dalam hal sistem pemerintahan dan politik, melonggarkan kekuasaan pusat tidak ada dalam agenda Soeharto dan pemerintahan Orde Baru. Pada masa-masa pemerintahan tersebut prioritas utama lebih ditekankan kepada penegakkan kekuatan pemerintah pusat atas birokrasi dan militer yang terbagi dan dipolitisir. Pemerintah juga melakukan langkah sentralisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya kekuatan kontrol politik pemerintah pusat atas daerah sangat dominan dan kuat.

Pemerintah Orde Baru tak hanya membangun citra bidang politik saja dalam membangun kehidupan bangsa dan negara, namun juga melakukan pembangunan sektor ekonomi. Kekuatan politik Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menjadikan pembangunan ekonomi sebagai pusat perhatian utama. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan dan harapan jika kehidupan ekonomi semakin baik, maka akan mempermudah langkah pemerintah Orde Baru dalam memperoleh dan memperkuat legitimasi kekuasaan yang baru saja dicengkram serta dapat merebut simpati

dari rakyat (Hariyono, 2006:308-309).

Demi mengatasi carut marut dan krisis ekonomi pasca tumbangannya rezim Soekarno, maka pemerintah Orde Baru membentuk Tim Ekonomi⁶⁾ yang ditugaskan untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari luar negeri (A.Katoppo, 2000:269). Tim Ekonomi tersebut bertujuan utama mendekati pihak asing untuk melakukan *rescheduling* hutang lama yang telah jatuh tempo. Disamping itu Tim Ekonomi yang dibentuk pemerintah juga bertugas mengusahakan bantuan keuangan yang baru dari luar negeri, serta berusaha menarik Penanaman Modal Asing ke Indonesia (Zulkarnain Djamin, 1993:197).

Tim ahli yang dibentuk itu pun segera memainkan peranannya dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa. Kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan sebagai usaha untuk melakukan stabilitas dan rehabilitas ekonomi, terlebih dahulu “digarap” oleh Sudharmono dan Wijoyo. Hal tersebut bertujuan agar dalam sidang kabinet tidak ada lagi perdebatan. Alur tersebut kemudian berlanjut dengan petunjuk dan arahan dari Presiden Soeharto sebagai *decision maker* (A.Katoppo, 2000:270).

Propaganda pembentukan citra

- 5) Pembahasan tentang profil politik luar negeri Indonesia yang bersifat *low profile* dan *hard profile* dapat dibaca di Ganewati Wuryandari (ed), *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik*, P2P-LIPI, Jakarta, 2008.. Pemberian istilah *hard profile* pada politik luar negeri yang diterapkan pada masa Orde Lama merujuk pada model kebijakan yang diterapkan oleh presiden Soekarno waktu itu dalam menanggapi berbagai permasalahan internasional. Soekarno memiliki keberanian untuk menolak kebijakan Barat dan mengambil posisi yang berseberangan dengan negara Barat dalam konteks tertentu dan justru mengadakan hubungan dekat dengan negara Komunis hingga membentuk Poros Jakarta-Peking-Pyongyang. Sedangkan pada masa Orde Baru, kebijakan luar negeri Indonesia dibawah presiden Soeharto lebih lunak dibandingkan dengan pendahulunya. Soeharto menerapkan keberpihakan yang lebih pro Barat atas nama pembangunan nasional. Soeharto juga mengubah kebijakan yang keras terhadap negara-negara di kawasan menjadi kebijakan yang lebih “bersahabat” dan mencoba mengambil kepercayaan dari negara-negara di kawasan dan internasional dengan meyakinkan mereka melalui pembentukan ASEAN dan masuknya kembali Indonesia ke PBB.
- 6) Tim Ekonomi sering disebut sebagai staf pribadi Soeharto yang terdiri dari pakar ekonomi Universitas Indonesia. Tim tersebut terdiri Wijoyo Nitisastro sebagai ketua, Dr. Mohamad Sadli, Dr. Emil Salim, Dr. Ali Wardana, Dr. Subroto, dan Dr. Sumitro Joyohadikusumo. Mereka merupakan inti dari teknokrat Orde Baru yang banyak mempengaruhi kebijakan Ekonomi yang dibuat oleh Presiden Soeharto. A. Katoppo, *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, Sumitro Djojohadikusumo*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hlm.269.

Orde Baru sebagai pemerintahan yang kuat, baik secara politik maupun ekonomi, sebenarnya tak hanya dilakukan melalui kebijakan-kebijakan saja. Pidato-pidato kenegaraan Soeharto selama memimpin Orde Baru besar pengaruhnya terhadap citra yang berusaha dibentuk untuk meraih simpati rakyat. Dalam menciptakan stabilitas kekuasaannya, Presiden Soeharto dan orang-orang terdekatnya tak hanya mengandalkan legitimasi MPRS, tentara dan GOLKAR saja. Orde Baru jelas membutuhkan dukungan berbagai alat negara, baik yang bersifat konstitusional ataupun yang sifatnya ekstra konstitusional untuk melancarkan agenda politiknya. Untuk itulah kemudian Presiden Soeharto membentuk Asisten Pribadi (ASPRI), serta menjalankan Operasi Khusus (Opsus) untuk melakukan apa saja demi membangun konsolidasi rezim yang baru. Opsus juga sengaja dirancang untuk menginfiltrasi partai politik, menjalankan kebijakan "*divide et impera*" dan menjalankan praktek-praktek untuk memaksakan kehendak lainnya agar semua agenda Orde Baru dapat terlaksana tanpa hambatan yang berarti. Operasi tersebut terus berlangsung sangat rahasia hingga 1980-an, ketika kekuasaan Soeharto dan Orde Baru telah berdiri kokoh dan kuat (Muhamad Hisyam, 2003:117).

Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum di Indonesia, masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto selama 32 tahun merupakan masa yang melelahkan karena kepemimpinan yang militeristik dan represif. Harus diakui bahwa beberapa pencapaian, terutama di bidang ekonomi, memang diraih.⁷⁾ Akan tetapi, pencapaian itu sangat tidak merata. Jakarta pada khususnya dan

Jawa pada umumnya memang bisa dikatakan menikmati hasil pembangunan tersebut, tetapi daerah-daerah lain di luar itu tidaklah demikian. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu terjadinya kecemburuan dan konflik sosial-politik di daerah-daerah di luar Jawa. Selain itu, pembangunan yang terlalu berpihak pada pemilik modal (kapitalistik) juga menimbulkan kesenjangan yang sangat jauh antara si kaya dan si miskin (Acep Iwan Saidi, 2007:161).

Dalam menciptakan dan menebarkan propaganda, Soeharto beserta pemerintah Orde Baru berusaha memanfaatkan berbagai media yang ada. Penguasaan dan dominasi Orde Baru atas berbagai media massa, semakin membuat arus propaganda yang menyebar ketengah masyarakat kian tak terbendung. Media cetak maupun elektronik seperti televisi seakan tak kuasa melakukan penolakan untuk menjadi corong pemerintah Orde Baru dengan berbagai agenda propagandanya.

Sarana atau media propaganda Orde Baru lebih banyak memanfaatkan pemberitaan yang beredar di surat kabar, dan melalui munculnya berbagai acara-acara yang ditayangkan TVRI selaku satu-satunya televisi nasional pada masa tersebut. Berbagai slogan-slogan propaganda dan segala hal mengenai pencitraan Orde Baru mengisi berbagai lembaran berita surat kabar maupun tema-tema acara yang ada pada media televisi. Oleh karena itulah, bisa dikatakan pada masa Orde Baru, media massa hanya menjadi perantara antara komunikator yang duduk di jabatan tertinggi pemerintahan sehingga informasi yang beredar pun hanya untuk kepentingan pemerintahan. Sementara itu, masyarakat diposisikan hanya

7) Salah satu keberhasilan Soeharto dan pemerintahan Orde Baru dalam pembangunan ekonomi adalah dengan melakukan penyusunan skala prioritas yang terperinci dalam program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)

sebagai komunikasi yang diinformasikan dengan berbagai propaganda.

Pada masa Orde Baru, media massa sendiri sengaja diatur oleh Soeharto untuk memiliki fungsi ganda atau berwajah dua. Fungsi yang pertama dari media massa saat itu ialah menjadi industri yang mampu mendorong kemajuan iklim investasi ke arah yang lebih baik. Terbukti pada tahun 1970, berdatangan dengan cukup *massive* berbagai agensi percetakan asing yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan kata lain, Orde Baru dan Soeharto saat itu telah membentuk media massa sebagai salah satu industri penyokong perekonomian negara (Effendi Gazali, 2004:22).

Wajah yang kedua atau fungsi kedua dari media massa saat itu ialah menjadi partner pembangunan bagi pemerintah. Dengan demikian media massa baik cetak maupun elektronik harus senantiasa mendukung program-program pemerintahan Orde Baru. Kontrol kuat dari pemerintah terhadap media massa saat itu dideklarasikan dengan slogan “Bebas Bertanggungjawab”, membuat semua aspek dari media massa berada dibawah pengawasan ketat dan kuasa dari Soeharto negara (Effendi Gazali, 2004:23).

Pengawasan dan kontrol terhadap segala aktifitas surat kabar maupun penyiaran pada media elektronik baik radio ataupun televisi, dilakukan di bawah kendali Departemen Penerangan. Pemerintah melalui Departemen Penerangan tak akan segan mencabut Surat Izin Terbit (SIT) maupun Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) bagi surat kabar yang dinilai “bandel” dan tidak taat dengan aturan yang telah dibuat oleh Orde Baru⁸⁾. Pada era 1970 an sendiri, siaran radio komersil maupun televisi nasional (TVRI) telah mengudara diberbagai kota

besar di Indonesia. Radio-radio dan TVRI saat itu sangat loyal dengan Departemen Penerangan sebagai wakil pemerintah dalam bidang pengawasan. Namun keduanya (stasiun penyiaran radio dan televisi nasional) tidak diperkenankan memproduksi siaran berita sendiri tanpa izin atau sepengetahuan dari pihak pemerintah (Effendi Gazali, 2004:23).

Pada periode 1966 hingga 1980 bertebaran banyak slogan yang sarat akan propaganda Orde Baru. Isu untuk menjaga stabilitas nasional demi lancarnya pembangunan nasional, merupakan alasan banyak bertebaran slogan propaganda diberbagai media massa. Namun lebih dari sekedar stabilitas dan pembangunan nasional, pemerintah Orde Baru berusaha membentuk negara yang aman dengan masyarakat yang patuh terhadap penguasa. Singkat kata slogan propaganda yang bertebaran tersebut digunakan untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan yang lebih kuat oleh Orde Baru.

Slogan-slogan propaganda pada masa Orde Baru digunakan untuk menyebarkan, menginformasikan, mengintensifkan dan sebagai perpanjangan dari kebijakan-kebijakan pemerintah (Zeffry Alkatiri, 2010:110). Tentu saja target utama dari slogan-slogan propaganda tersebut adalah masyarakat luas. Kebanyakan dari slogan-slogan yang bertebaran pada media massa merupakan slogan propaganda yang berkaitan dengan integrasi nasional dan kontrol sosial politik (Robert Jackall, 1995:1-2). Oleh sebab itulah Orde Baru sangat ketat dalam membuat kebijakan yang mengatur media massa.

Pada dasarnya slogan-slogan propaganda yang dikeluarkan pemerintah adalah slogan yang mampu

8) Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No.19/KEP/MENPEN/1969

mendukung program atau kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dengan kata lain slogan propaganda yang bertebaran sepanjang 1966 hingga 1980, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Diantaranya adalah slogan propaganda dalam konteks “kebijakan pers dan politik”, “pembangunan dan integrasi nasional”, dan “kesejahteraan sosial”.

Beberapa slogan bermuatan tentang “Pers Dan Kebijakan Politik Orde Baru” adalah sebagai berikut:

“Konperensi-Kerdja PWI Mendjebol Orde Lama, Membina Orde Baru” (Surabaya Post 10, Oktober 1966). Slogan tersebut menegaskan dukungan pers terhadap pemerintah Orde Baru melalui PWI. Meskipun PWI sendiri adalah organisasi profesi yang sengaja dibentuk oleh Orde Baru untuk mendukung kebijakan politik penguasa termasuk sebagai alat kontrol negara terhadap pers. Selain itu slogan tersebut berusaha mempropagandakan gerakan anti Orde Lama yang saat itu dianggap sebagai penghambat pembangunan.

“Pers Bebas Dan Bertanggung Jawab” adalah slogan Orde Baru untuk mengatur keterlibatan pers dalam menerjemahkan kehendak politik penguasa (Muhamad Hisyam, 2003:389-390). Namun pada kenyataannya kekuatan politik Orde Baru telah membungkam kebebasan pers untuk mengungkap realitas politik yang sebenarnya terjadi.

“Orde Baru Adalah Sikap Mental Bermoral Pancasila” merupakan slogan Orde Baru yang ditujukan untuk menegaskan mengenai pentingnya Pancasila sebagai ideologi tunggal Indonesia (Kompas, 2 Oktober 1972). Pemerintah mengeluarkan slogan tersebut dengan maksud untuk terus mengikis pengaruh ideologi komunis yang dianggap sebagai musuh besar negara.

“Aku Nyoblos Golkar!” merupakan slogan propaganda politik

Orde Baru pada masa Pemilu 1977 untuk mendongkrak suara Golkar (Suara Indonesia, 25 Februari 1977). Pada masa Pemilu 1977 muncul pula slogan “Yang Apatis Terhadap Pemilu Adalah Penghianat”. Slogan yang tercetak pada harian *Suara Indonesia* tersebut bertujuan agar rakyat dan semua pihak turut mendukung jalannya Pemilu.

“Menyeleweng Ditindak, Tak Bersalah Diayomi” merupakan slogan yang dikeluarkan oleh mendagri Amir Machmud pada harian (Suara Indonesia, 13 Februari 1978). Tujuan dari slogan tersebut adalah untuk menepis adanya isu pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang para pejabat dan aparatur negara. Amir Machmud berpendapat bahwa akan menindak segala penyalahgunaan wewenang yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Slogan propaganda dalam konteks “Pembangunan dan Integrasi Nasional” adalah sebagai berikut:

“Orde Baru Adalah Orde Pembangunan” adalah slogan pada masa awal Orde Baru berkuasa yang bertujuan untuk mencitrakan cita-cita luhur Orde Baru (Surabaya Post, 24 April 1968). Slogan tersebut diharapkan mampu membangkitkan dukungan rakyat kepada Orde Baru untuk melakukan pembangunan yang akan diusung dalam program REPELITA.

“TVRI Menjalin Persatuan dan Kesatuan” merupakan slogan yang diberikan kepada TVRI sebagai corong resmi pemerintah untuk menyuarakan isu-isu keberhasilan pembangunan (Ade Armando, 2011:74). Dalam slogan tersebut pemerintah berharap melalui TVRI dapat terjalin persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyokong pembangunan nasional.

“Hanya Dengan Pelita Yang Berlanjut, Kebodohan Dan Kemiskinan Bisa Diatasi”, adalah slogan pemerintah Orde Baru untuk mempropagandakan keberlangsungan program REPELITA (Suara Indonesia, 24 April 1977).

Pemerintah berusaha memupuk solidaritas rakyat untuk bersama-sama mendukung pemerintah dalam pembangunan nasional. Presiden Soeharto dengan slogan tersebut berusaha meyakinkan rakyat untuk mengatasi bersama setiap persoalan bangsa, termasuk mengatasi kemiskinan dan kebodohan.

Slogan propaganda pemerintah Orde Baru dengan konteks “Kesejahteraan Sosial” adalah sebagai berikut:

“Dua Anak Cukup” merupakan slogan pemerintah Orde Baru dalam rangka program Keluarga Berencana Nasional (Lusy S. Mize, 2006:20-21). Slogan tersebut senantiasa didengungkan oleh BKKBN melalui berbagai cara agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam program untuk mengurangi angka kelahiran tersebut.

“KB, Listrik, dan Koran” adalah slogan yang dibuat untuk melaksanakan pembangunannya ke wilayah pedesaan. Slogan tersebut juga dikenal sebagai Trio Pembaharuan masyarakat desa. Diharapkan dengan program tersebut masyarakat desa mampu diberdayakan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional (Suara Indonesia, 6 Januari 1977).

Tujuan utama dari slogan propaganda yang diterbar oleh rezim Orde Baru adalah sebagai stimulus pembangunan. Dapat dipahami jika banyak kebijakan yang dikeluarkan

pemerintah selalu akan mendapatkan porsi yang berlebih dalam setiap pemberitaan media massa. Dengan membangun kesan positif akan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berusaha mendapatkan dukungan penuh dari semua lapisan masyarakat.

Orde Baru yang menasbihkan diri sebagai Orde Pembangunan, selalu mendengungkan isu-isu mengenai pembangunan nasional (Surabaya Post, 24 April 1968)⁹⁾. Pelaksanaan pembangunan yang diusung oleh Orde Baru kemudian dirangkai menjadi sebuah konsep yang dikenal sebagai Trilogi Pembangunan. Konsep tersebut terdiri dari stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan (BangkaPos.com, Edisi 15 April 2008). Dapat dikatakan Trilogi Pembangunan merupakan strategi kunci pembangunan yang dilaksanakan dalam pemerintahan Soeharto.

Beberapa agenda maupun kebijakan pemerintah yang disusun dapat dikatakan sebagai wujud dari propaganda akan Trilogi Pembangunan. Agenda besar Orde Baru dalam kurun waktu 1966 hingga 1980 diantaranya adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), Program Keluarga Berencana (KB), serta Pemilihan Umum tahun 1971 dan 1977 yang penuh dengan nuansa agitatif.

Dengan demikian pada dasarnya tujuan Orde Baru dan program-programnya adalah untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang modern dengan masyarakat yang aman,

- 9) Pengalaman hiperinflasi dan kekacauan politik yang melanda Indonesia membuat para pemimpin negara menerapkan kebijakan stabilisasi sebagai kebutuhan mutlak untuk menjaga kekuatan dan keutuhan nasional. Para pemimpin Orde Baru menilai bahwa kehilangan stabilitas bisa memporak-porandakan fungsi pasar dan merusak basis perubahan sosial masyarakat sipil. Pertumbuhan, khususnya untuk negara miskin seperti Indonesia pertumbuhan mutlak diperlukan. Hanya dengan pertumbuhan ekonomi negara berpeluang untuk melayani kebutuhan hidup rakyatnya. Dan komponen ketiga dari trilogi pembangunan adalah pemerataan. Benar atau salah, Indonesia cenderung melihat kolonialisme sebagai contoh kapitalisme dalam bentuk terburuk. Kesenjangan pendapatan yang besar dan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan anggota masyarakat lainnya merupakan karakteristik yang sering diasosiasikan dengan kapitalisme free-fight.

adil, tertib dan sejahtera, dimana tiap warga Indonesia mengenyam kesejahteraan lahiriah dan mental spiritual. Meskipun dengan menggunakan berbagai kebijakan yang ototiter, pada akhirnya rezim Orde Baru telah mampu membuat rakyat tunduk dan patuh terhadap kekuasaannya. Sebagai bukti kepatuhan tersebut adalah keberhasilan REPELITA pada periode 1969-1979, serta kemenangan Golkar dalam dua Pemilu pertama yang diselenggarakan rezim Orde Baru.

Kesimpulan

Perubahan kondisi politik di Indonesia pasca peristiwa 1965 ditandai munculnya sosok Soeharto. Kemunculan seorang Soeharto pada panggung politik sebagai pemimpin Orde Baru mampu membuat perubahan yang sangat besar bagi kondisi Indonesia pasca lengsernya Soekarno. Orde Baru mampu mendominasi percaturan politik nasional, meski dengan berbagai cara dan proses yang cukup panjang.

Pada periode 1966 hingga 1980, merupakan tahap-tahap bagi Orde Baru untuk membuat *grand design* pemerintahannya. *Grand design* Orde Baru adalah membuat rakyat patuh dan menerima segala hal yang sudah digariskan pemerintah. Pada dasarnya rakyat dibuat untuk mengerti dan berpartisipasi untuk menjalankan program pembangunan yang sudah disusun pemerintah. Sedangkan untuk masalah politik rakyat tak perlu mengerti, dan biarkan pemerintah yang mengurus masalah tersebut. Singkat kata wacana pembangunan yang dibuat Orde Baru sebenarnya adalah bentuk isolasi politik penguasa terhadap rakyat.

Kondisi perpolitikan pada masa-masa awal Orde Baru berkuasa bisa dikatakan masih belum stabil. Pada periode tersebut Orde Baru disibukkan untuk menghilangkan citra Bung Karno dan Orde Lama. Manuver politik yang dilakukan oleh Orde Baru lebih terkesan

pada politik pencitraan serta kontrol ketat pemerintah dengan menggunakan militer, birokrasi, dan Golkar. Orde Baru juga tak segan melakukan tindakan represif untuk menindak segala gerakan yang bersifat subversif dan berpotensi mengancam kekuasaannya. Banyak lawan politik Orde Baru yang berakhir sebagai tahanan politik karena dianggap tidak mau tunduk dan patuh. Lembaga pers yang sebelumnya kritis berusaha dibungkam dan dijinakkan melalui berbagai kebijakan yang tentu saja menguntungkan pihak penguasa. Semua yang tindakan keras dan kontrol ketat tersebut dilakukan Orde Baru dengan mengatasnamakan stabilitas nasional sebagai prioritas.

Daftar Pustaka

ARSIP

Keputusan Menteri Penerangan
Republik Indonesia
No.19/KEP/MENPEN/1969

KORAN

Kompas, 3 November 1966

———, 16 Januari 1969

———, 5 Juni 1969

———, 2 Oktober 1972

Suara Indonesia, 6 Januari 1977

———, 17 Januari 1977

———, 14 Februari 1977

———, 21 Februari 1977

———, 25 Februari 1977

———, 26 Februari 1977

_____, 27 Februari 1977

_____, 4 April 1977

_____, 24 April 1977

_____, 2 Mei 1977

_____, 13 Mei 1977

_____, 7 Januari 1978

_____, 6 Februari 1978

_____, 13 Februari 1978

Suara Karya, 6 Juni 1971

_____, 2 Oktober 1971

Surabaya Post, 10 Oktober 1966

_____, 25 Juli 1967

_____, 26 Juli 1967

_____, 16 September 1967

_____, 24 Januari 1968

_____, 25 Januari 1968

_____, 24 April 1968

_____, 3 Juni 1968

BUKU

Abar, Akhmad Zaini. 1995. *1966-1974 Kisah Pers Indonesia*. Yogyakarta : LKis.

Alagappa, Muthiah. 1995. *Political Legitimacy in Southeast Asia*. Stanford California : Stanford University Press.

Armando, Ade. 2011. *Televisi Jakarta Di Atas Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Bentang Anggota Ikapi.

Anke Niehof., dkk. 2003. *Two Is*

Enough: Family Planning In Indonesia Under The New Order 1968-1998. Leiden : KITLV Press.

Boileau, Julian M. 1983. *Golkar: Function Group Politics in Indonesia*. Jakarta : CSIS.

Crouch, Harold. 1998. *The Army and Politics in Indonesia*. USA : Cornell University Press.

Djamin, Zulkarnain. 1996. *Masalah Utang Luar Negeri, Bagi Negara-Negara Berkembang dan Bagaimana Indonesia Mengatasinya*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

_____. 1993. *Pembangunan Ekonomi Indonesia, Sejak REPELITA Pertama*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

_____. 1993. *Pinjaman Luar Negeri Serta Prosedur Administratif Dalam Proyek Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Effendi, Sofian. 1989. *Hambatan Struktural Pengawasan Legislatif*. Jakarta : Prisma 6 LP3ES.

Gazali, Effendi. 2004. *Communication of Politics and Politics of Communication in Indonesia: A Study on Media Performance, Responsibility and Accountability*. Nijmegen : Doctoral Thesis Radboud University.

Gramsci, Antonio. 2001. *Catatan-Catatan Politik*. Surabaya : Pustaka Prometheus.

Hanazaki, Yasuo. 1998. *Pers Terjebak*. Jakarta : Institut Arus Informasi.

- Hisyam, Muhamad. 2003. *Krisis Masa Kini Dan Orde Baru*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Jackall, Robert. 1995. *Propaganda*. New York : New York University Press.
- Katoppo, A. 2000. *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, Sumitro Djojohadikusumo*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Kusmanto, Heri. 2007. *Desa Tertekan Kekuasaan*. Medan : BITRA Indonesia.
- Liddle, R. William. 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru*. Jakarta : LP3ES.
- Malarangeng, Rizal. 2010. *Pers Orde Baru: Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*. Jakarta : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Mas'ood, Mochtar. 2008. *Perbandingan Sistem Politik: Tiga Model Pembuatan Kebijaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Mize, Lucy S. dkk. 2006. *35 Years Commitment To Family Planning In Indonesia: BKKBN and USAID's Historic Partnership*. Bloomberg: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication.
- Moertopo, Ali. 1981. *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta : CSIS.
- Palmer, Monte. 1973. *Dilemas of Political Development*. Florida : F.E Peacock Publisher Inc.
- Riyanto, Bedjo. 2000. *Iklan Surat Kabar dan Perubahn Masyarakat Jawa Masa Kolonial (1870-1915)*. Yogyakarta : Tarawang.
- Santoso. 1997. *Ilusi Sebuah Kekuasaan. Surabaya* : Institut Studi Arus Informasi dan Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya.
- Santoso, Priyo Budi. 1997. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru (Persepektif Kultural dan Struktural)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Schiller, James. 1978. *Development Ideology in New Order Indonesia*. Ohio : Ohio University.
- Silalahi, Harry Tjan. 1990. *Konsensus Politik Nasional Orde Baru : Ortodoksi dan Aktualisasinya*. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Soeharto. 1985. *Amanat Kenegaraan I, 1967-1971*, Jilid II. Jakarta : Inti Indayu Press.
- Sudibyo, Agus. 2006. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta : LKis.
- Tambunan, A.S. 1995. *Dwi Fungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Vatikiotis, Michael R.J. 1993. *Indonesian Politics Under Suharto (Order, Development And Pressure For Change)*. London : Routledge.
- Wiryanto. 2000. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta : Grasindo.

JURNAL PENELITIAN

- Alkatiri, Zeffry., dkk, *National Integrations Slogans in Printed Mass Media in the Era of New Order Regime in Indonesia 1968-1998*, Jakarta: International Journal for Historical Studies, Volume 2, Nomer 1, 2010
- Hariyono, *Kebijakan Ekonomi di Awal Orde Baru Membuka Pintu Lebar-Lebar bagi Modal Asing*, Malang: Jurnal Eksekutif Volume 3, Nomer 3, Desember 2006.
- Saidi, Acep Iwan, *Indonesia Dalam Dua Orde: Sebuah Citra Yang Retak*, Jakarta: Jurnal Sosioteknologi. Edisi 10 Tahun 6, April 2007